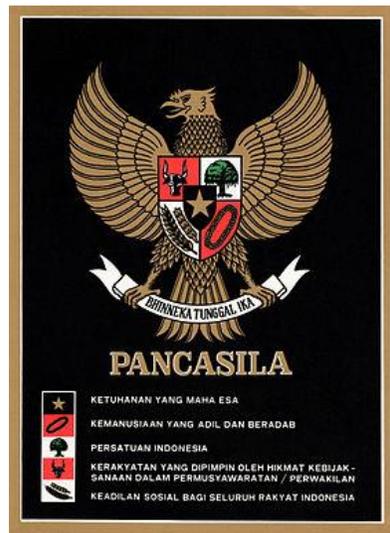




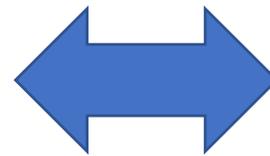
MEMASTIKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI KLHS RPJMD

**DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (SUPD) I
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

AMANAT PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”



TRANSFORMING OUR WORLD:



THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT



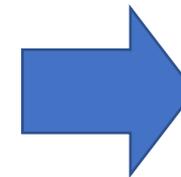
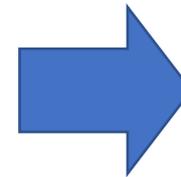


KEWAJIBAN DAERAH

- ✓ **Membuat KLHS RPJMD**
- ✓ **Menjamin Kualitas KLHS RPJMD**
- ✓ **Menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD**
- ✓ **Menyusun Ranwal RPJMD**
- ✓ **Menyusun Rankhir RPJMD**
- ✓ **Menyusun dan menetapkan Perda RPJMD**



- Pembuatan KLHS RPJMD dilakukan sebelum/bersamaan dg Rancangan Teknokratik RPJMD**
- Perda RPJMD disusun dan ditetapkan 6 bulan setelah kepala daerah dilantik**



Prinsip-Prinsip penyusunan RPJMD:

1. **Transparan,**
2. **Responsive,**
3. **Efisien,**
4. **Efektif,**
5. **Akuntabel**
6. **Partisipatif,**
7. **Terukur,**
8. **berkeadilan,**
9. **berwawasan lingkungan dan**
10. **berkelanjutan.**

(Permendagri 86/2017)



UU 32/2009 – DEFINISI & INSTRUMEN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek **lingkungan hidup, sosial,** dan **ekonomi** ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan

Instrumen Pembangunan Berkelanjutan

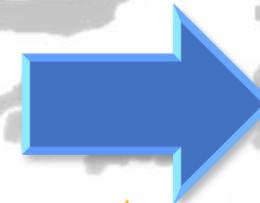
KLHS → rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan **partisipatif** untuk **memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi** dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program



INTEGRASI TPB DALAM RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

	1 TANPA KEMISKINAN 	2 TANPA KELAPARAN 	3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA 	4 PENDIDIKAN BERKUALITAS 	5 KESETARAAN GENDER
6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK 	7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU 	8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI 	9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR 	10 BERKURANGNYA Kesenjangan 	11 KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN
12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB 	13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM 	14 EKOSISTEM LAUT 	15 EKOSISTEM DARATAN 	16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELAMBAGAN YANG TANGGUH 	17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH



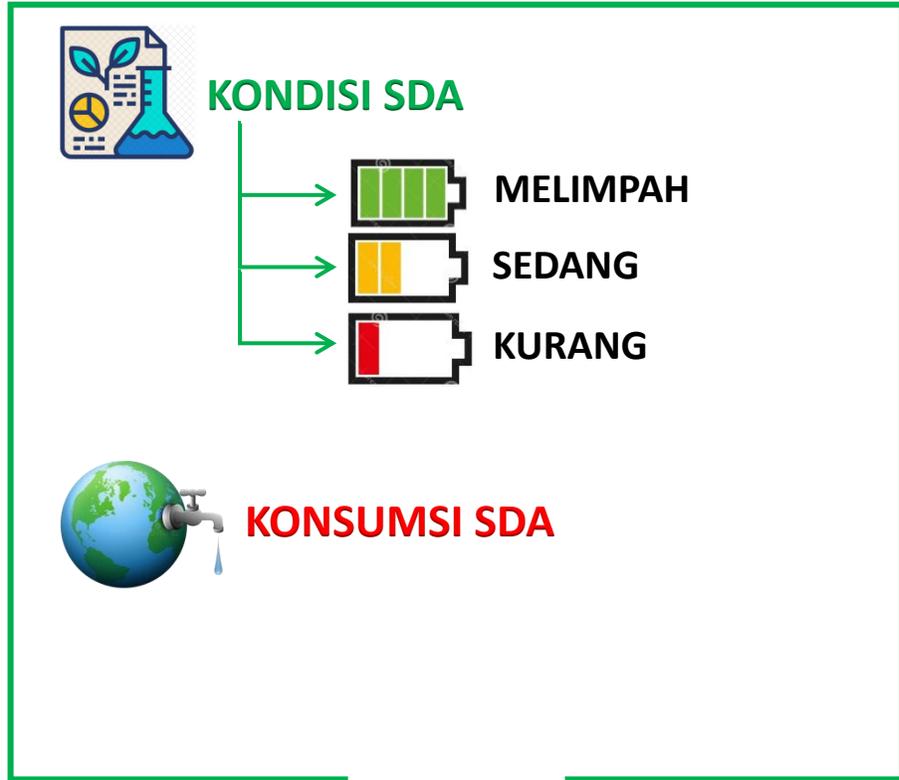
Instrumen Pembangunan Berkelanjutan



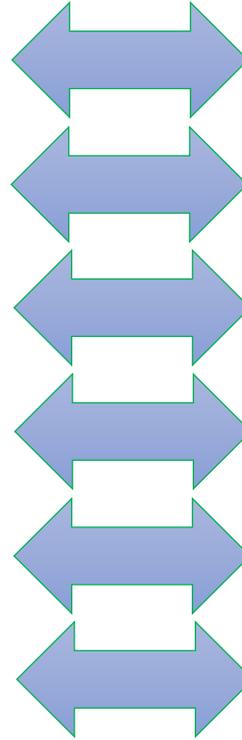
**Permendagri No. 7 Tahun 2018
Pembuatan & Pelaksanaan KLHS
dalam Penyusunan RPJMD**



KONSEP KLHS

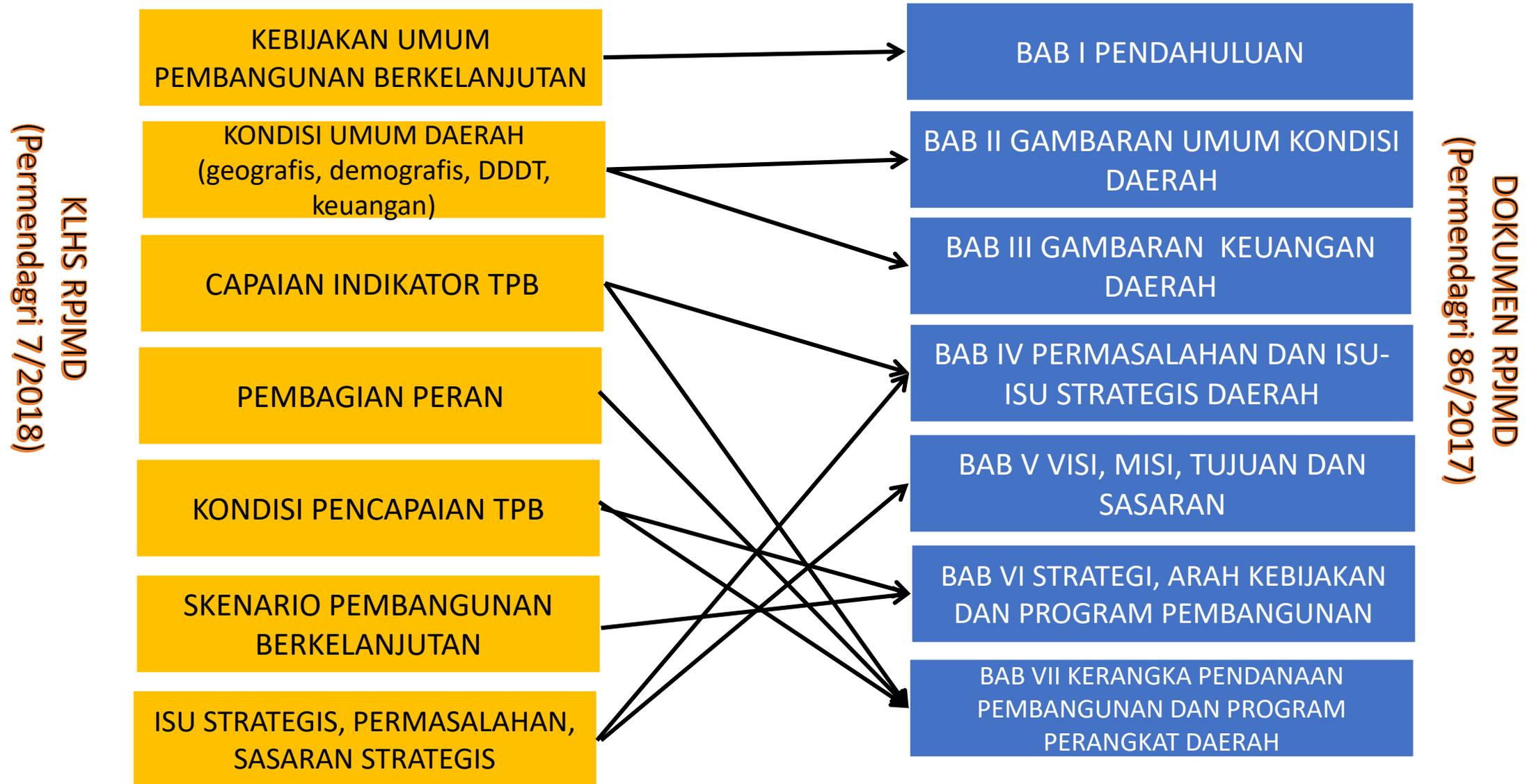


**PEMBANGUNAN
BERWAWASAN LINGKUNGAN**



**PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN**

INTEGRASI SDGs (HASIL KLHS) DALAM RPJMD





PENELAAHAN KLHS DALAM PENYUSUNAN RPJMD

(Permendagri 86/2017 – lampiran)

PENELAAHAN KLHS RPJMD

Penelaahan KLHS RPJMD merupakan bagian dari tata cara penyusunan dan Perubahan dokumen RPJMD dan dokumen rencana perangkat daerah

TUJUAN

Memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah

TATA CARA

1. Mengidentifikasi dan menentukan skenario pembangunan berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih serta laporan KLHS
2. Penyusunan analisis teknis KLHS mengacu kepada peraturan perundang-undangan
3. Penyusunan analisis pembangunan berkelanjutan dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan daerah mengedepankan asas keberlanjutan
4. Mengintegrasikan rekomendasi pembangunan berkelanjutan ke dalam rancangan dokumen RPJPD/RPJMD

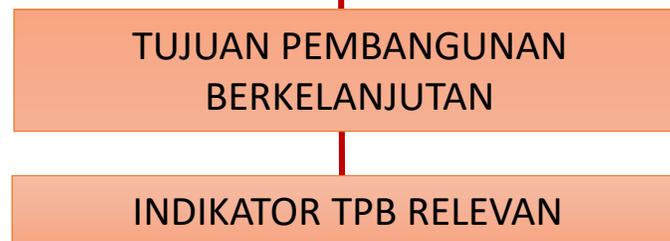
PENELAAHAN KLHS DALAM PENYUSUNAN RPJMD



KLHS RPJMD



TPB



SPM





URGENSI PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS RPJMD

KLHS RPJMD dibuat sebelum waktu pelantikan kepala daerah. Sehingga tenggat waktu pembuatan KLHS RPJMD adalah **WAKTU PELANTIKAN** tersebut.

Jadwal Pelantikan Kepala Daerah (tentatif)

Gelombang 1



5 Sept 2018

Gubernur/Wakil Gubernur

27 Sept 2018

Gubernur/Wakil Gubernur

Gelombang 2



17 Des 2018

Gubernur/Wakil Gubernur

20 Des 2018

Bupati/Wakil Bupati
Walikota/Wakil Walikota

Gelombang 3



11 Maret 2019

Gubernur/Wakil Gubernur

14 Maret 2019

Bupati/Wakil Bupati
Walikota/Wakil Walikota

Gelombang 4



3 Juni 2019

Gubernur/Wakil Gubernur

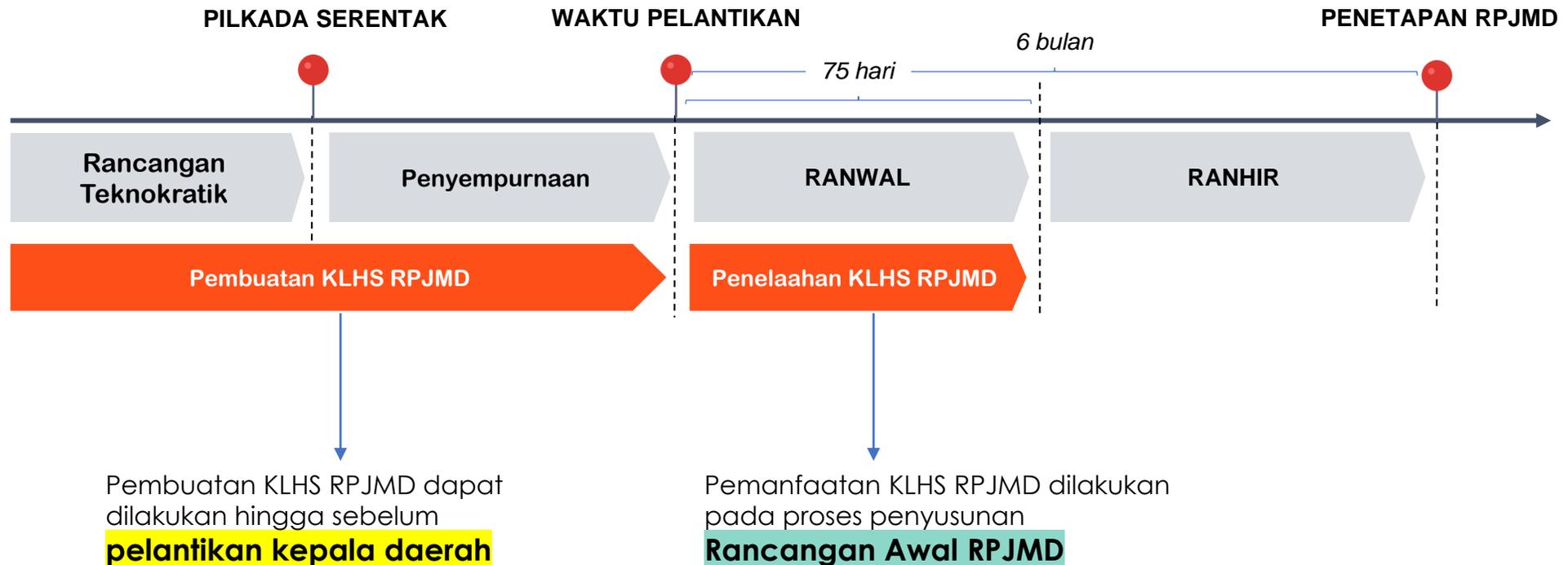
6 Juni 2019

Bupati/Wakil Bupati
Walikota/Wakil Walikota

 **80 daerah**

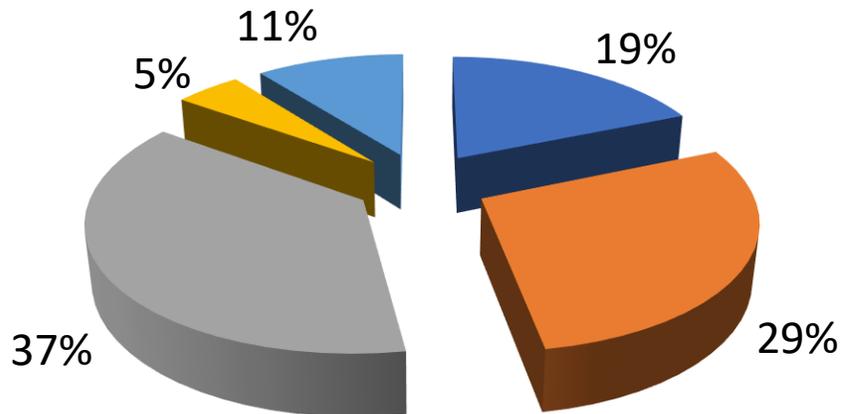
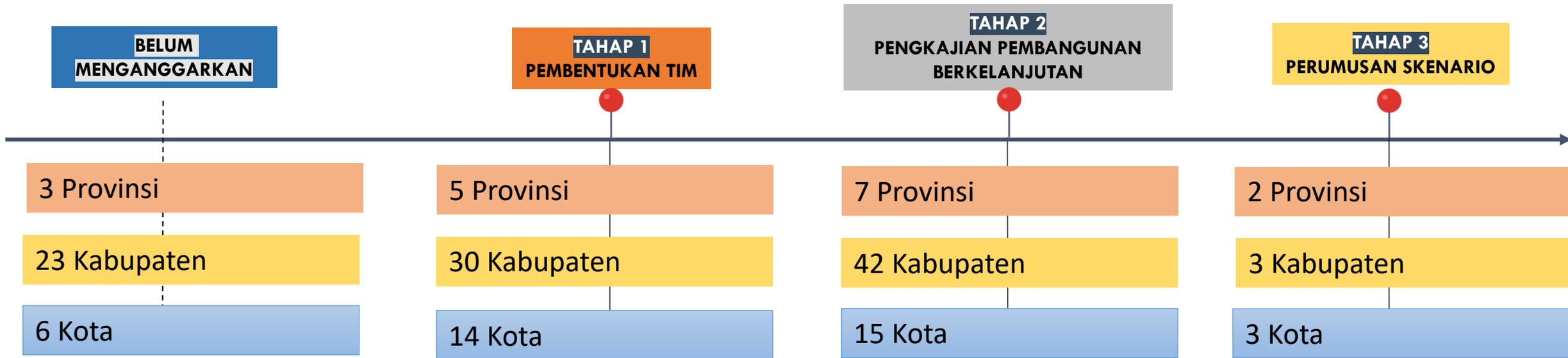


TIMELINE PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS RPJMD



PROGRES DAERAH DALAM PEMBUATAN KLHS RPJMD

171 daerah



- Belum menganggarkan
- Tahap 1
- Tahap 2
- Tahap 3
- Belum konfirmasi

Data per 1 September 2018



TERIMA KASIH

**NARAHUBUNG KLHS RPJMD
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI**

WILAYAH	NARAHUBUNG	WHATSAPP
SUMATERA	Anggi Aran Putra	0853-7426-0877
JAWA BALI NUSA TENGGARA	Ramdhan Anjar S	0857-9702-2260
KALIMANTAN	Ahmad Sahab	0857-1459-2759
SULAWESI	Nicita Meinanda Y	0816-1931-395
MALUKU PAPUA	Ahmad Sahab	0857-1459-2759

**DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I
SUB-DIREKTORAT LINGKUNGAN HIDUP**

Telp./fax: 021-7942660

Email: subdit5.lh@gmail.com